AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP STATUS KEWARGANEGARAAN

Tengku Erwinsyahbana

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: tengkuerwins@umsu.ac.id

Abstrak

Perkawinan biasanya berlangsung hanya antara orang-orang yang hidup dalam satu kelompok masyarakat, tetapi karena kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, maka menjadi lazim pula terjadinya perkawinan antar orang berlainan kewarganegaraan, yang disebut dengan istilah perkawinan campuran. Permasalahan yuridis dapat muncul dalam perkawinan campuran, antara lain terkait dengan status kewarganegaraan, baik itu status kewarganegaraan suami atau istri, maupun status kewarganegaraan anak. Masalah ini menarik untuk dianalisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan status kewarganegaraan suami, istri dan anak sebagai akibat perkawinan campuran. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa perkawinan campuran tidak selalu harus menyebabkan istri mengikuti kewarganegaraan suami, dan dalam perkawinan campuran dapat menyebabkan status kewarganegaraan ganda bagi anak, tetapi setelah anak tersebut mencapai usia 18 tahun atau sudah kawin walaupun belum berusia 18 tahun, maka ia dapat memilih menjadi Warga Negara Indonesia atau warga negara asing sesuai, dengan kewarganegaraan salah satu orang tuanya yang berkewarganegaraan asing.

Kata Kunci: Kewarganegaraan, Perkawinan Campuran, Warga Negara

A. Pendahuluan

Setiap manusia dalam masyarakat akan saling ketergantungan dengan manusia yang lainnya. Hal ini sesuai dengan kodrat dan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka hidup berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu, maka dirinya berkeinginan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga.

Hidup bersama dalam suatu rumah antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukum, lazim disebut dengan istilah perkawinan. Hubungan yang terjadi dalam suatu perkawinan pada hakikatnya merupakan hubungan hukum, tetapi hubungan

hukum yang terjadi dalam perkawinan berbeda dengan hubungan hukum dalam lapangan hukum perdata umumnya, karena hubungan hukum dalam lapangan hukum perdata umumnya (misal jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain), merupakan hubungan hukum yang bersifat sementara dan lebih ditujukan untuk kepentingan ekonomis. Hubungan hukum dalam perkawinan tidak bersifat sementara, tetapi berlangsung untuk selamanya (kekal) dan bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan, selain itu juga mempunyai nilai ibadah, karena harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan biasanya berlangsung hanya antara orang-orang yang hidup dalam satu kelompok masyarakat, tetapi karena kemajuan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi, maka lazim pula terjadi perkawinan antar orang yang berlainan kewarganegaraan. Interaksi yang terjadi antar individu yang berbeda suku bangsa dan kewarganegaraan dalam berbagai bidang, tentunya akan melahirkan hubungan-hubungan hukum, yang antara lain adalah melalui perkawinan yang disebut dengan istilah perkawinan campuran.

Perkawinan campuran akan membawa konsekuensi tersendiri, yaitu berlakunya peraturan dari masing-masing *ste/se/* hukum yang berlaku terhadap masing-masing pihak. Khususnya di Indonesia, masalah perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1974). Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, maka yang dimaksud dengan perkawinan campuran hanyalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.¹

Permasalahan yuridis dapat saja terjadi dalam perkawinan campuran, terutama terkait dengan penentuan status kewarganegaraan, baik itu status kewarganegaraan suami atau istri, maupun status kewarganegaraan anak. Masalah status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran tentunya akan membawa konsekuensi yuridis terhadap harta perkawinan, dan oleh sebab itu masalah ini menarik untuk dianalisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan status hukum kewarganegaraan suami/istri dan anak akibat adanya perkawinan campuran.

¹ Saidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 198.

B. Hukum Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar kawin, yang kemudian diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an”. Istilah yang sama dengan kata kawin yang lazim juga digunakan dalam bahasa Indonesia ialah nikah, kalau diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an” menjadi pernikahan. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami istri.²

Menurut bahasa Arab kawin disebut dengan “*nikah*”.³ *Al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau *ibarat 'an al-wath wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad,⁴ dengan demikian istilah “nikah” yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia, sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi, berarti kata nikah mempunyai dua makna, yaitu perjanjian/akad dan bersetubuh/berkumpul.

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, memberikan pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dikatakan sebagai perkawinan apabila yang melangsungkannya adalah seorang pria dengan seorang wanita, oleh sebab itu tidak termasuk ke dalam pengertian perkawinan apabila yang melangsungkannya adalah dua orang yang mempunyai jenis kelamin sama (pria dengan pria atau wanita dengan wanita). Bahkan menurut Sidi Gazalba dalam buku Idris Ramulyo dikatakan bahwa tidak merupakan perkawinan andaikata ikatan lahir batin tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dimasukkan unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, pertimbangannya bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, yang

² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 453.

³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsiran Al-Qur'an, Jakarta, 1973, hlm. 468.

⁴ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Prenada Media, 2004, Jakarta, hlm. 38.

⁵ Mohd. Idris Ramulyo (1), *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 44.

sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan tidak saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.⁶ Perkawinan merupakan aqad atau perjanjian, tetapi tidak berarti bahwa perjanjian ini sama artinya dengan perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian menurut KUHPerdata memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjiannya, sebaliknya dalam perkawinan, para pihak tidak dapat menentukan isi perjanjian selain yang sudah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Isi dari persetujuan antara suami istri dalam suatu perkawinan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum.⁷

Adanya rumusan kalimat "... dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, menunjukkan makna bahwa aspek agama tidak dapat diabaikan oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, dengan kata lain bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah, jika pelaksanaannya telah sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh para pihak yang melangsungkan perkawinan. Berbeda misalnya dengan aturan hukum perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdata yang berdasarkan Pasal 26 disebutkan bahwa undang-undang memandang perkawinan dari hubungan keperdataan. Perkawinan dalam sistem Negara Hukum Pancasila, sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai hubungan individual antara pria (suami) pada satu sisi dengan wanita (istri) pada sisi lainnya (dalam pengertian hubungan yang hanya bersifat keperdataan), tetapi harus dipandang sebagai ikatan suci (ikatan lahir bathin) yang didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Perbedaan lain yang dapat dilihat adalah dalam hal berakhirnya perjanjian. Pada perjanjian biasa, berakhirnya perjanjian ditetapkan oleh kedua belah pihak, misalnya karena telah tercapainya apa yang menjadi pokok perjanjian atau karena batas waktu yang ditetapkan telah berakhir, jadi tidak berlangsung terus menerus. Sebaliknya perkawinan tidak mengenal batasan

⁶ Mohd. Idris Ramulyo (2), *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 2.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Keenam, Sumur, Bandung, 1976, hlm. 8.

⁸ Tengku Erwinsyabana, "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2012, hlm. 10.

waktu. Perkawinan harus kekal, kecuali karena suatu hal di luar kehendak para pihak, barulah perkawinan dapat diputuskan, misalnya dengan perceraian atau pembatalan perkawinan.⁹

Pemutusan perkawinan tidak sederhana seperti dalam pemutusan perjanjian biasa, yang ditetapkan lebih awal dalam isi perjanjiannya. Prosedur untuk memutuskan ikatan perkawinan maupun kemungkinan atau alasan untuk memutusnya, tidak ditetapkan oleh para pihak, melainkan hukumlah yang menentukan demikian. Perjanjian dalam perkawinan mempunyai karakter khusus, antara lain bahwa kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.¹⁰

Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹¹ Selanjutnya menurut Sayuti Thalib, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan,¹² sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹³

2. Syarat sah perkawinan

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, ditentukan bahwa perkawinan dianggap sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak. Setelah perkawinan dilakukan, maka perkawinan tersebut harus dicatatkan, dengan demikian, perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama.¹⁴ Aspek agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif untuk mencatatkan perkawinan. Kedua aspek ini harus terpenuhi, dan jika perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan undang-

⁹ Tengku Erwinsyahbana, "Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Poligami (Suatu Analisis terhadap Keputusan Pengadilan Agama Nomor: 238/Pdt.G/1999/PA-Medan dari Perspektif Fiqh Islam)", *Media Hukum*, Volume XIII Nomor 1, Januari-Juni 2004, hlm. 203-204.

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 10.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 7.

¹² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Cetakan Kelima, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 47.

¹³ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1993, hlm. 23.

¹⁴ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 61.

undang, tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan adalah tidak sah. Sebaliknya, jika perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama, tanpa memperhatikan atau mengabaikan undang-undang, maka perkawinan tersebut juga dianggap tidak sah.¹⁵

Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Berhubung syarat-syarat perkawinan telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lama dinyatakan tidak berlaku.¹⁶

Perkawinan yang dilangsungkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974). Maksud dari ketentuan ini ditujukan agar suami dan istri yang akan kawin itu dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.¹⁷ Secara lengkap, syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974, sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapat izin kedua orang tua, dan dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;

¹⁵ Wahono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Gitama Jaya, Jakarta, 2003, hlm. 102.

¹⁶ Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 11.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 42.

- c. Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut di atas atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapat, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan izin, setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut di atas; dan
- d. Ketentuan tersebut di atas berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁸

Selain syarat berupa persetujuan calon mempelai dan izin orang tua, maka berdasarkan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Penyimpangan terhadap ketentuan batasan usia minimal ini dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain untuk ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun pihak wanita.

Menurut Ko Tjay Sing dalam Mulyadi,¹⁹ dikatakan bahwa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan terdiri dari syarat materil dan syarat formil. Syarat materil merupakan syarat mengenai orang-orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu:

- a. syarat-syarat mutlak, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin dengan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin (misalnya batasan usia).
- b. syarat-syarat relatif, yaitu syarat-syarat yang terkait dengan larangan terhadap orang yang tidak boleh dikawini, yang terdiri dari:
 - 1) Larangan perkawinan antara orang yang masih ada hubungan darah atau semenda, yaitu:
 - a) berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas;
 - b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;

¹⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 40-41.

¹⁹ Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 11-12.

- d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan;
 - e) berhubungan saudara dengan istri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; dan
 - f) hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- 2) Larangan perkawinan karena masih terikat perkawinan dengan orang lain.
 - 3) Larangan perkawinan karena pasangan suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat-syarat formil merupakan syarat-syarat yang mendahului perkawinan. Syarat-syarat formil diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu:

- a. Pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan;
- b. Penelitian syarat-syarat perkawinan; dan
- c. Pengumuman pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan tujuannya untuk memberitahukan kepada setiap yang berkepentingan guna mencegah perkawinan, berhubung karena alasan-alasan tertentu dapat saja terjadi bahwa ada hal penghalang perkawinan yang tidak diketahui atau terlepas dari pengamatan pegawai pencatat perkawinan dan pengumuman tadi bermaksud untuk memfungsikan pengawasan yang dilakukan khalayak ramai.²⁰

3. Akibat hukum perkawinan

Suatu perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum akan menimbulkan berbagai akibat hukum. Akibat hukum dari suatu perkawinan itu pada dasarnya menyangkut 3 (tiga) aspek penting, yaitu:

- a. Timbulnya hubungan antara suami istri;
- b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan; dan

²⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 110.

- c. Timbulnya hubungan antara orang tua dengan anak.

Akibat perkawinan terhadap suami istri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Hak dan kewajiban antara suami istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan sebagai berikut:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan masyarakat;
- c. Suami istri berhak melakukan perbuatan hukum;
- d. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
- e. Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya;
- f. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia menyetia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain; dan
- g. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang ditentukan oleh suami istri secara bersama.

Akibat hukum perkawinan terhadap harta benda suami istri diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; dan
- b. harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa dalam suatu perkawinan ada dua kelompok harta yaitu harta bersama dan harta bawaan, termasuk di dalamnya harta benda yang diperoleh masing-masing suami istri berupa hadiah atau warisan.

Mengenai luas batas harta bersama dengan jelas telah ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang hanya diperlukan satu syarat, yaitu harta itu diperoleh selama perkawinan. Oleh karena itu, menurut M. Yahya Harahap yang termasuk harta bersama suami istri adalah:²¹

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Undang-undang Perkawinan Nasional*, Zahir Trading. Co, Medan, 1975, hlm. 121.

- a. segala penghasilan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, termasuk penghasilan yang berasal dari barang-barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan harta bersama itu sendiri; dan
- b. segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai.

Pengertian harta bawaan tidak diatur secara tegas dalam UU No. 1 Tahun 1974, tetapi dapat diartikan sebagai harta yang sudah dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentulah hadiah atau warisan yang diperoleh masing-masing suami istri selama dalam ikatan perkawinan, tetapi jika harta diterima sebelum perkawinan, maka termasuk dalam pengertian harta bawaan. Untuk menentukan harta bawaan menjadi harta bersama, maka harus dibuat perjanjian kawin secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 UU 1 Tahun 1974 yang menentukan hal-hal sebagai berikut:

- a. pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian kawin yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang terkait;
- b. perjanjian tersebut tidak akan disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan;
- c. perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan; dan
- d. selama dalam perkawinan perjanjian tidak dapat dirubah, kecuali jika kedua belah pihak setuju serta tidak merugikan pihak ketiga.

Berhubung Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974, belum mendapat pengaturan lebih lanjut dalam PP No. 9 Tahun 1975, sehingga belum dapat diberlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal itu diperlukan ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan lama, yaitu hukum agama (kaedah agama), hukum adat dan KUH Perdata.²²

²² | Ketut Mandra, "Studi tentang Pelaksanaan dan Sahnya Perkawinan Campuran Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing di Bali", *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 1986, hlm. 15.

Akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik. Mengenai kedudukan anak serta hubungan orang tua dengan anak-anaknya itu diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974, yang menentukan sebagai berikut:

- a. kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;
- b. apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena putusan pengadilan, maka atas permohonan dari pihak suami atau istri, pengadilan akan menyerahkan anak-anak tersebut kepada suami istri yang benar-benar beritikad baik, untuk dipelihara dan dididik secara baik;
- c. anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah pengawasan kedua orang tuanya (selama tidak dicabut dari kekuasaannya), dan orang tua mewakili anak terhadap segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
- d. orang tua boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah kawin sebelumnya, kecuali kalau untuk kepentingan anak menghendaki; dan
- e. kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut, untuk jangka waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Anak tidak hanya mempunyai hak terhadap orang tuanya, tetapi juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya, yaitu kewajiban untuk menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Setelah anak dewasa, maka ia wajib menurut kemampuannya untuk memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas jika mereka memerlukan bantuannya.

C. Perkawinan Campuran Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974

Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka dalam bidang hukum perkawinan telah tercipta unifikasi hukum, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan campuran antar warga negara yang berbeda. Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk

pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Hal pertama yang perlu mendapat perhatian bahwa rumusan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dibatasi hanya pada perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, sedangkan perkawinan antara sesama Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum agama yang berlainan, tidak merupakan perkawinan campuran.

Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, masalah perkawinan campuran diatur dalam GHR (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*) *Staatsblad* 1898 Nomor 158, dan berdasarkan GHR bahwa perkawinan campuran yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum berlainan. Dengan demikian, yang termasuk perkawinan campuran yaitu:

1. Perkawinan internasional;
2. perkawinan antar golongan;
3. Perkawinan antar tempat (antar adat); dan
4. Perkawinan antar agama.

Menurut pendapat kebanyakan ahli hukum dan yurisprudensi yang dimaksudkan perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masing-masing pada umumnya tunduk/takluk pada hukum yang berlainan. Memperhatikan ketentuan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu dari pasangan yang kawin berkewarganegaraan Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkawinan campuran menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah perkawinan campuran internasional. Sehubungan dengan masalah perbedaan kewarganegaraan, maka berdasarkan Pasal 58 UU No. 1 Tahun 1974, orang yang melakukan perkawinan campuran tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istri, dan dapat kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang tentang kewarganegaraan (sekarang Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia).

Perkawinan campuran menimbulkan hubungan perdata yang merupakan bagian dari cakupan hukum perdata internasional, karena dalam perkawinan campuran mengandung unsur asing, yaitu terdapat dua kewarganegaraan yang

berbeda. Unsur asing inilah yang menjadikan hubungan tersebut bersifat internasional sehingga menimbulkan hubungan hukum perdata internasional. Perkawinan campuran ini akan membawa konsekuensi tersendiri yaitu berlakunya peraturan dari masing-masing *ste/sei* hukum yang berlaku terhadap masing-masing pihak yang terlibat.

Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka berdasarkan GHR (S. 1898 No. 158), istri mengikuti status hukum suami dan dengan demikian istri mengikuti status hukum kewarganegaraan suami. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 2 GHR bahwa seorang perempuan (istri) yang melakukan perkawinan campuran selama perkawinan itu belum putus, si perempuan (istri) tunduk pada hukum yang berlaku bagi suaminya baik hukum publik maupun hukum sipil.

Dalam hukum perdata internasional, dikenal ada 2 (dua) konsepsi mengenai status personil ini, yakni:²³

1. Konsepsi yang luas, yaitu:
 - a. dalam bidang hukum perorangan, seperti wewenang untuk mempunyai hak-hak hukum pada umumnya dan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum;
 - b. dalam hukum kekeluargaan, demikian juga dalam hal perwalian dan kuasa; dan
 - c. pewarisan dalam arti yang seluas-luasnya.
2. Konsepsi yang sempit, yaitu semua yang termasuk dalam konsepsi status personil yang luas, kecuali mengenai pewarisan.

Dari kedua konsepsi ini (baik yang luas maupun yang sempit), maka perkawinan termasuk pula sebagai status personil. Hal yang menjadi persoalan adalah terkait dengan hukum harus digunakan terhadap status personil sehubungan dengan adanya peristiwa hukum yang termasuk ke dalam hubungan hukum perdata internasional.

Memperhatikan konsep-konsep hukum dalam hukum perdata internasional, maka dikenal 2 (dua) aliran atau prinsip mengenai hukum yang berlaku terhadap status personil ini, yaitu:²⁴

²³ Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 1-6.

²⁴ *Idem*, hlm. 8.

1. Prinsip personalitas, yang menentukan bahwa status personil dari seseorang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing ditentukan oleh hukum nasionalnya. Dengan demikian, dimanapun seseorang berada, maka yang berlaku adalah hukum nasionalnya.
2. Prinsip teritorialitas, yang menentukan bahwa hukum yang berlaku bagi status personil seseorang adalah hukum dimana orang tersebut berada atau berdomisili.

Sehubungan dengan prinsip-prinsip yang berlaku, maka prinsip yang dianut di Indonesia didasarkan pada Pasal 16 *Algemene Bepalingen (AB)*, yang menentukan bahwa bagi penduduk Hindia Belanda (Warga Negara Indonesia), peraturan perundang-undangan yang mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku terhadap mereka apabila mereka berada di luar negeri. Ketentuan ini berlaku sesuai dengan status personil yang mencakup.²⁵

1. Hukum perseorangan, termasuk hukum keluarga dan perkawinan.
2. Peraturan-peraturan mengenai benda-benda yang tidak tetap.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa hukum perdata internasional di Indonesia menganut prinsip personalitas terhadap status personil. Dengan demikian, bagi Warga Negara Indonesia dimana pun ia berada, maka status personilnya tetap berlaku Hukum Nasional Indonesia. Prinsip nasionalitas ini nyatanya berlaku secara analogi bagi orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Hal ini merupakan pendirian yang tetap dari yurisprudensi. Adapun Yurisprudensi yang dapat dikemukakan sebagai contoh, yaitu:

1. Putusan Raad van Justitie (RvJ) di Medan, tanggal 8 Oktober 1925, yang menerima hukum Jepang yang berada di Indonesia, yang hendak minta failismen tanpa bantuan suaminya
2. Putusan *Hoogerchtshof*, tanggal 25 Juni 1936, telah mempergunakan hukum harta benda perkawinan Tionghoa untuk suami istri yang telah menikah di Tiongkok pada tahun 1910.²⁶

Mengenai status kewarganegaraan dalam perkawinan campuran menurut hukum positif Indonesia saat ini mengacu pada UU No. 12 Tahun 2006. Pada

²⁵ Sunaryati Hartono, *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional*, Cetakan Pertama, Karya Nusantara, Bandung, 1976, hlm. 12.

²⁶ Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, hlm. 179-180.

dasarnya undang-undang ini menempatkan kedudukan laki-laki dan wanita didasarkan pada asas persamaan, bahwa baik laki-laki maupun wanita, dapat kehilangan status kewarganegaraan sebagai Warga Negara Indonesia jika kawin dengan warga negara asing. Hal ini sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan campuran tidak dengan sendirinya menyebabkan istri atau suami tunduk pada hukum kewarganegaraan suami atau istri, karena dalam Pasal 58 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa bagi orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2006, seorang Warga Negara Indonesia yang kawin dengan seorang warga negara asing dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, jika menurut hukum negara asal suami atau istri yang berkewarganegaraan asing tersebut ditentukan bahwa suami atau istri mengikuti kewarganegaraan suami atau istri. Sedangkan berdasarkan ayat (3) ditentukan pula bahwa suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, jika memang hal ini tidak menyebabkan terjadinya kewarganegaraan ganda.

Berdasarkan Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2006, warga negara asing yang kawin dengan Warga Negara Indonesia, dapat pula menyampaikan pernyataannya menjadi Warga Negara Indonesia jika yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda. Dengan demikian, status kewarganegaraan untuk menjadi Warga Negara Indonesia akibat adanya perkawinan tidak berlaku secara serta merta, melainkan bersifat alternatif, artinya dapat dipergunakan atau tidak oleh warga negara asing yang bersangkutan.

Sesuai ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 12 Tahun 2006, maka dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan perkawinan campuran berhak dengan bebas menentukan sikapnya untuk memilih kewarganegaraannya. Adanya kebebasan bagi para pihak adalah hal

menentukan kewarganegaraannya menimbulkan kemungkinan terjadinya kesulitan untuk menentukan hukum yang harus digunakan jika terjadi suatu peristiwa hukum, sebab berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan campuran maupun sebagai akibat putusanya perkawinan menentukan hukum yang berlaku bagi mereka baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata.²⁷

Salah satu kesulitan yang dapat saja terjadi dalam hubungannya dengan status kewarganegaraan akibat perkawinan campuran, yang salah satu pihak (suami atau istri) tetap mempertahankan status kewarganegaraan asalnya adalah terkait dengan penentuan status kewarganegaraan anaknya. UU No. 1 Tahun 1974 tidak ada secara tegas mengatur status kewarganegaraan anak yang orang tuanya berbeda kewarganegaraan. Namun demikian, berdasarkan Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 ditentukan bahwa dalam suatu perkawinan yang salah satu pihak (suami atau istri) berkewarganegaraan Indonesia dan pihak lain (istri atau suami) berkewarganegaraan asing, maka anaknya berstatus sebagai Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006, jika terdapat perbedaan status kewarganegaraan suami istri dalam suatu perkawinan, maka dapat terjadi bahwa anak mempunyai status kewarganegaraan ganda, tetapi setelah anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, maka anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan ini disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

D. Penutup

Perkawinan campuran yang dilakukan antara Warga Negara Indonesia dan warga negara asing tidak menimbulkan akibat hukum yang mengharuskan istri mengikuti kewarganegaraan suami, karena berdasar UU No. 12 Tahun 2006 tidak menganut asas kesatuan kewarganegaraan dalam perkawinan yang mengacu kepada suami. Dalam perkawinan yang pasangan suami istri berbeda kewarganegaraan, dapat menyebabkan status kewarganegaraan ganda terhadap

²⁷ Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1978, hlm. 17.

anak, tetapi setelah anak tersebut mencapai usia 18 (delapanbelas) tahun atau sudah kawin walau belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, maka kawin ia dapat memilih menjadi Warga Negara Indonesia atau berkewarganegaraan asing sesuai dengan kewarganegaraan salah satu orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kamus:

- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Prenada Media, 2004, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Undang-undang Perkawinan Nasional*, Zahir Trading. Co, Medan, 1975.
- Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1978.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/pentafsiran Al-Qur'an, Jakarta, 1973.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- , *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Saidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1976.
- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Cetakan Kelima, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Subekti, R., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1993.
- Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, 1985.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Sunaryati Hartono, *Pokok-pokok Hukum Perdata Internasional*, Cetakan Pertama, Karya Nusantara, Bandung, 1976.

Wahono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, Gitama Jaya, Jakarta, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Keenam, Sumur, Bandung, 1976.

Jurnal/Laporan Penelitian:

Mandra, I Ketut, "Studi tentang Pelaksanaan dan Sahnya Perkawinan Campuran Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing di Bali", *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 1986.

Tengku Erwinsyahbana, "Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Poligami (Suatu Analisis terhadap Keputusan Pengadilan Agama Nomor: 238/Pdt.G/1999/PA-Medan dari Perspektif Fiqh Islam)", *Media Hukum*, Volume XIII Nomor 1, Januari-Juni 2004.

Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 Nomor 1, 2012.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.